

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

3.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2009 dan Perkiraan Tahun 2010

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2009

Krisis Keuangan Global yang mengakibatkan lumpuhnya perekonomian dunia, ternyata masih dapat meningkatkan perekonomian daerah. Selama tahun 2009, perekonomian daerah mampu tumbuh 5,01%, lebih baik dari pertumbuhan nasional, yang mencapai 4,5%. Pertumbuhan ini selain didukung oleh semua sektor ekonomi walaupun kondisinya belum maksimal, didukung pula oleh kondisi makro yang cukup kondusif, antara lain laju inflasi yang terkendali. Sepanjang tahun 2009 laju inflasi mencapai 3,62%, sehingga harga barang dan jasa masih terjangkau oleh tingkat pendapatan masyarakat.

Pilar perekonomian daerah adalah sektor perdagangan, industri dan pertanian. Ketiga sektor ini berperan sebesar 73,87% terhadap total perekonomian daerah. Sektor industri mengalami pertumbuhan sekitar 2,61%. Pertumbuhan ini masih ditopang oleh tumbuhnya sub sektor makanan, minuman dan tembakau yang peranannya terhadap sektor industri mencapai 50 % lebih, sedangkan sub sektor industri tekstil, barang dari kulit dan alas kaki, barang dari kayu dan hasil hutan lainnya, dan sub sektor industri logam dasar besi dan baja mengalami penurunan. Hal ini antara lain disebabkan menurunnya permintaan domestik sedangkan permintaan ekspor non migas terutama untuk beberapa produk industri masih mengalami peningkatan.

Sektor pertanian yang memiliki pasar domestik cukup kuat, nampaknya cukup mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada level 5%, hal ini antara lain disebabkan membaiknya produksi tanaman bahan makanan, sehingga pada tahun 2009 mampu meningkat sekitar 3,72%, sedangkan sub sektor tanaman perkebunan, peternakan dan perikanan tumbuh sebesar 4% sampai 5%. Demikian juga dengan sektor konstruksi, pada tahun 2009 mengalami pertumbuhan yang cukup baik, yaitu sekitar 4,25%, sehingga mampu untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada level 5%.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran juga tergolong sektor yang memiliki pasar domestik sangat kuat, terutama sub sektor perdagangan. Dalam tahun 2009, sektor ini mampu tumbuh 5,53%. Pertumbuhan ini didukung oleh tumbuhnya sub sektor perdagangan sebesar 5,25%, hotel 5,84% dan sub sektor restoran 6,91%. Peningkatan sektor ini menandakan, bahwa krisis keuangan

Keuangan

global secara umum tidak berdampak secara signifikan terhadap perekonomian daerah.

Sektor angkutan dan komunikasi selama tahun 2009 tumbuh sangat fantastik, yaitu mencapai 12,20%. Peningkatan ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya sub sektor komunikasi yang menjamurnya pemakaian telepon seluler, yang sekarang sudah menjadi gaya hidup dan penggunaan komunikasi internet yang sudah masuk ke wilayah kecamatan, sehingga pertumbuhannya mencapai 22,63%. Demikian juga sub sektor angkutan jalan raya yang masih merupakan alat transportasi utama yang digunakan masyarakat, mampu tumbuh 3,04%. Kedua sub sektor ini berperan cukup besar dalam menopang sektor angkutan dan komunikasi.

Tabel.3.1
Struktur Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur berdasarkan 9 Lapangan Usaha Tahun 2009 ADHK 2000

No	Sektor	Pertumbuhan (%)	Kontribusi (%)
I	Pertanian	4,01	16,39
II	Pertambangan dan Penggalian	7,06	2,17
III	Industri Pengolahan	2,62	28,04
IV	Listrik, Gas dan Air Bersih	2,58	1,82
V	Konstruksi	4,25	3,40
VI	Perdagangan, Hotel dan Restoran	5,70	29,44
VII	Pengangkutan dan Komunikasi	12,14	5,69
VIII	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	5,68	4,76
IX	Jasa-jasa	6,65	8,29
<i>PDRB</i>		5,01	100,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 2009

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa peranan sektor ekonomi terbesar adalah sektor perdaganga, hotel dan restoran, disusul sektor industri pengolahan, dan sektor pertanian. Dari ketiga sektor tersebut pada tahun 2008 kontribusinya sudah mencapai angka sebesar 74,33%, pada tahun 2009 sedikit menurun menjadi sebesar 73,87%. Penurunan ini diakibatkan oleh menurunnya peran sektor pertanian dan sektor industri, sementara itu sektor lainnya rata-rata mengalami peningkatan.

Sektor pertanian peranannya terus menurun, meskipun produktivitas pertanian, khususnya produksi tanaman bahan makanan, dan peternakan pada tahun 2008 dan 2009 menunjukan kinerja yang cukup impresif. Selama tahun 2008 total peranan sektor pertanian sebesar 16,58%, dengan kontribusi terbesar berasal dari subsektor tanaman bahan makanan sebesar 9,76% diikuti

oleh

oleh subsektor peternakan dan subsektor tanaman perkebunan masing-masing sebesar 2,95 % dan 2,67 %. Selanjutnya selama tahun 2009 kontribusi sektor pertanian menjadi 16,39 %, juga masih didukung oleh subsektor tanaman bahan makanan, subsektor peternakan dan subsektor perkebunan masing-masing sebesar 8,60 %, 2,94 % dan 2,65 %.

Sektor pertambangan dan penggalan peranannya mulai sedikit bergerak, seiring dengan meningkatnya produktivitas minyak bumi di kawasan Bojonegoro dan sekitarnya. Pada tahun 2007 peranan sektor pertambangan dan penggalan sebesar 2,11 %, dan tahun 2009 peranannya meningkat menjadi sebesar 2,17 %.

Peranan sektor industri pengolahan terus menurun, tahun 2007 peranannya sebesar 28,75 %, selanjutnya tahun 2008 menurun menjadi sebesar 28,48 %, dan tahun 2009 diperkirakan menurun lagi menjadi sebesar 28,04 %. Hampir seluruh kelompok industri pengolahan mengalami penurunan peranan, terutama untuk industri makanan, minuman dan tembakau, industri tekstil, barang dari kulit dan alas kaki, dan industri barang-barang dari kayu. Ketiga subsektor ini sejak tahun 2007 perkembangannya terus melambat, bahkan cenderung turun, terutama untuk industri tekstil, barang dari kulit dan alas kaki, dan industri barang - barang dari kayu. Kendala utama adalah harga bahan baku yang berasal dari impor dan pangsa pasar ekspornya.

Peranan sektor listrik, gas dan air bersih juga terus menurun, sejalan dengan melambatnya produktivitas subsektor listrik. Sejak Januari 2008 produktivitas listrik Jawa Timur terus melambat dan cenderung stagnan sehingga peranannya terus tergeser oleh sektor lainnya. Tahun 2007 peranan subsektor listrik masih sebesar 1,39 %, tahun 2008 menurun menjadi sebesar 1,27 %, dan tahun 2009 menjadi sebesar 1,17 %. Sedikit berbeda dengan subsektor gas. Berlakunya himbauan pemerintah untuk mengurangi konsumsi minyak tanah, dan mengalihkannya ke gas elpiji, ternyata ikut mendorong perkembangan subsektor gas kota. Tahun 2007 peranan subsektor gas kota sebesar 0,44 %, tahun 2008 meningkat menjadi sebesar 0,53 %, dan tahun 2009 meningkat lagi menjadi sebesar 0,56 %. Sedangkan subsektor air bersih peranannya terlihat diangka 0,08 %.

Peranan sektor konstruksi terlihat sudah bangkit kembali setelah sempat tidak bergerak selama 4 tahun (2005 – 2008), pada tahun 2009 sektor konstruksi sudah mampu memberikan kontribusi sebesar 3,40 %, Terutama untuk konstruksi jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya, dan sebagian

konstruksi

konstruksi perumahan dan real estate di wilayah Malang, Jombang, Mojokerto dan kota-kota lainnya.

Seperti telah di jelaskan sebelumnya sektor perdagangan, hotel dan restoran, merupakan sektor yang paling stabil, terutama subsektor perdagangan. Tahun 2008 peranan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 29,26 %, dengan kontribusi terbesar sub sektor perdagangan sebesar 23,90 %. Pada tahun 2009 peranan sub sektor perdagangan meningkat menjadi sebesar 23,97 %, sehingga total peranan sektor perdagangan, hotel dan restoran akan meningkat menjadi sebesar 29,44 %.

Peranan sektor angkutan dan komunikasi juga masih terlihat terus meningkat, terutama untuk subsektor komunikasi. Tahun 2007 kontribusi sektor angkutan dan komunikasi sebesar 5,55 %, tahun 2009 meningkat menjadi sebesar 5,69 %. Sejak diberlakukannya instruksi Menteri Komunikasi dan Informasi pada awal tahun 2008 terhadap seluruh provider industri telepon *selular* untuk menurunkan tarif rata-rata hingga 30 % lebih, produktivitas subsektor komunikasi terus meningkat, terutama untuk komunikasi rumah tangga dan swasta. Tahun 2007 kontribusi komunikasi swasta sebesar 1,69 %, tahun 2009 meningkat menjadi sebesar 1,88 %. Sedangkan untuk subsektor lainnya rata-rata kontribusinya masih di bawah 1,69 %.

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan juga sedikit mengalami peningkatan peranan, terutama untuk subsektor jasa persewaan. Tahun 2008 kontribusi sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 4,70 %, tahun 2009 masih akan meningkat menjadi sebesar 4,76%.

Apabila diukur dengan angka absolut PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB Jawa Timur pada tahun 2009 mencapai Rp. 684,23 trilyun atau meningkat sebesar 10,5% bila dibandingkan dengan tahun 2008 yang tercatat Rp. 619,00 trilyun. Dengan data jumlah penduduk dari hasil proyeksi penduduk berdasarkan SUPAS Tahun 2005 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 37.286.246 jiwa dengan pertumbuhan sebesar 0,52% maka PDRB per kapita Jawa Timur tahun 2009 mencapai Rp 18,35 juta per kapita per tahun. Angka ini secara kasar menunjukkan, bahwa secara rata-rata setiap penduduk memiliki pendapatan sekitar Rp 18,35 juta dalam setahun atau Rp.1,53 juta dalam sebulan, suatu angka diatas upah minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Selanjutnya, ditinjau dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur Tahun 2009 banyak ditopang oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 7,84%. Sedangkan, peranan konsumsi rumah tangga tercatat

sebesar

sebesar 67,75%. Kegiatan konsumsi rumah tangga, yang merupakan penggerak utama ekonomi, mampu tumbuh lebih baik seiring meredanya tekanan inflasi dan membaiknya keyakinan konsumen. Aktivitas konsumsi ini didukung oleh adanya beberapa hari raya dan liburan panjang yang mengiringinya. Penjualan barang *durable goods* seperti kendaraan bermotor masih mampu tumbuh meskipun suku bunga kredit yang tinggi.

Tabungan masyarakat menjadi sumber pembiayaan konsumsi di samping kredit perbankan. Kegiatan investasi swasta tumbuh meskipun masih dalam tren perbaikan. Investasi ini diperkirakan merupakan realisasi barang modal yang telah dikumpulkan beberapa waktu sebelumnya sehingga tidak terpengaruh langsung oleh krisis ekonomi global. Kinerja ekspor dan neraca perdagangan luar negeri mengalami peningkatan. Ekspor ke Amerika terus menampakkan penurunan, khususnya pada produk furnitur dan hasil perikanan. Sedangkan volume impor mulai menurun meskipun secara nilai masih tumbuh tinggi karena pelemahan nilai tukar Rupiah.

Tabel 3.2
Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB menurut Penggunaan
Tahun 2009

No	Sektor	Pertumbuhan (%)	Kontribusi (%)
I	Konsumsi rumah tangga	7,84	67,75
II	Konsumsi lbg Sos tdk mencari untung	5,34	0,63
III	Konsumsi pemerintah	12,40	7,88
IV	Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,22	17,92
V	Perubahan stok	-120,44	1,25
VI	Ekspor	9,24	46,41
VII	Impor	9,22	41,85
<i>PDRB</i>		5,01	100,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 2009

Krisis finansial global ternyata tidak berdampak besar terhadap kinerja ekspor non-migas Jawa Timur. Kontribusi realisasi nilai ekspor non-migas Jawa Timur terhadap realisasi nilai ekspor non-migas nasional selama ini cukup tinggi. Pada tahun 2005 mencapai 10,72%, kemudian meningkat menjadi 11,33% pada tahun 2006, dan pada tahun 2007 menjadi 12,92%.

Kinerja ekspor non-migas Jawa Timur tahun 2009 mencapai 10,011 miliar dolar AS, atau mengalami peningkatan sebesar 0,41% dibanding tahun 2008 yang mencapai 9, 970 miliar dolar AS.

Pesatnya pertumbuhan ekspor ini didukung oleh 10 komoditas utama Jawa Timur, yaitu pengolahan tembaga, kimia dasar; pengolahan kayu; kertas dan karton; ikan dan udang; perabot penerangan rumah; tembakau; mesin dan alat-alat listrik; alas kaki; dan karet dan bahan dari karet. Kesepuluh komoditas tersebut memberikan kontribusi terbesar terhadap ekspor Jawa Timur, yaitu sebesar 78 %. Adapun sepuluh negara tujuan utama ekspor Jawa Timur adalah Jepang, Malaysia, Amerika Serikat, RRC, Thailand, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Australia dan Jerman.

Nilai impor Jawa Timur pada tahun 2009 mencapai 9,130 miliar dolar AS, sedangkan pada tahun 2008 tercatat sebesar 11,435 miliar dolar AS, atau menurun sebesar 20,16%, yang mencapai 2,69 miliar dolar AS. Adapun sepuluh komoditas utama impor non-migas Jawa Timur adalah mesin/pesawat mekanik, besi baja, ampas/sisa industri makanan, plastik dan bahan dari plastik, pupuk, aluminium, mesin dan peralatan listrik, bahan kimia, gandum, dan bubur kayu/pulo. Sedangkan sepuluh negara utama asal impor Jawa Timur meliputi, Cina, Amerika Serikat, Singapura Jepang, Australia, Thailand, India, Taiwan, Jerman dan Korea Selatan.

Secara umum, kinerja perdagangan luar negeri untuk produk non migas pada tahun 2009 mengalami surplus sebesar 0,881 milyar dolar AS. Sedangkan neraca perdagangan ekspor-impor barang dan jasa dari dan ke Jawa Timur pada tahun 2009 mengalami surplus sebesar [Rp. 31,21 triliun](#).

Sementara itu, perkembangan realisasi investasi di Jawa Timur menunjukkan tren positif. Pada tahun 2009 tercatat ada 75 proyek penanaman modal asing (PMA) senilai 411,85 juta dolar AS. Pada periode sama tahun sebelumnya hanya terdapat 73 proyek investasi baru yang terealisasi dengan nilai 422,56 juta dolar AS. Untuk proyek penanaman modal dalam negeri (PMDN), pencapaiannya juga mengalami perbaikan. pada tahun 2008 tercatat 38 proyek dengan nilai Rp 2,45 triliun, dan pada tahun 2008 tercatat 46 proyek dengan nilai Rp 2,98 triliun.

Total tenaga kerja Indonesia yang bisa diserap melalui investasi (PMDN dan PMA) pada tahun 2008 sebanyak 31.279 orang. Sementara jumlah pencari kerja yang terdaftar pada tahun 2008 sebanyak 913.410 orang, dan jumlah penganggur mencapai 1.296.313 orang. Pada tahun 2009, kondisi ini diperkirakan tidak jauh berbeda, dan masih ditambah tenaga kerja korban PHK, dan juga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dipulangkan. Tapi bagaimanapun, investasi dan ekspor non-migas Jawa Timur harus tetap didorong untuk terus meningkat.

Pada

Pada tahun 2009, kinerja ekspor Jawa Timur mengalami peningkatan secara signifikan, baik nilai maupun volume. Dinamika perekonomian Jawa Timur yang terus tumbuh, menyebabkan jumlah investasi mengalami peningkatan, hal ini dicerminkan dengan dinamika perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri terus tumbuh sepanjang tahun 2009. Kinerja perekonomian ini secara langsung didukung oleh peran perbankan dalam penyediaan dan penyaluran dana dari dan ke masyarakat. Hal ini terbukti dengan tingkat LDR yang mencapai sebesar 70%.

Mencermati kondisi makro ekonomi tahun 2009, menunjukkan bahwa perekonomian Jawa Timur mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh semakin membaiknya tingkat pendapatan masyarakat, menurunnya jumlah penduduk miskin serta membaiknya indeks pembangunan manusia.

3.1.2. Proyeksi Makro Ekonomi Jawa Timur Tahun 2010

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014, ditetapkan target pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2010 adalah 4,0%-4,5%. Pertumbuhan tersebut optimis dapat tercapai dan diperkirakan mencapai 6,0%-6,5%, mengingat kondisi eksternal (global) dan internal, baik nasional maupun regional cukup kondusif.

1) Lingkungan eksternal (Global)

Pertama, semakin membaiknya perekonomian dunia yang diawali dengan membaiknya perekonomian Amerika. Seperti diketahui bahwa Amerika merupakan negara tujuan ekspor terbesar ketiga setelah Jepang dan Malaysia. Dengan membaiknya perekonomian Amerika, diharapkan arus barang ke Amerika semakin meningkat dan posisi Amerika sebagai tujuan ekspor produk-produk Jawa Timur akan menggeser posisi Malaysia.

Kedua, diberlakukannya perdagangan bebas antara ASEAN dan China/ ASEAN - China Free Trade Agreement (AC-FTA). Hal ini akan sangat mempengaruhi kinerja perekonomian Jawa Timur. Untuk itu diperlukan upaya keterlibatan Jawa Timur dalam hal kerjasama ekonomi di kawasan-kawasan tersebut.

2) Lingkungan Internal (Nasional)

Pertama: Membaiknya kondisi ekonomi makro nasional didukung oleh laju inflasi yang terkendali, stabilnya nilai tukar rupiah, dan suku bunga

komersial

komersial perbankan yang makin kondusif bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kedua: Tingginya komitmen pemerintah pusat terhadap pemberdayaan sektor riil dan UMKM serta penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Ketiga: Besarnya komitmen pemerintah pusat terhadap pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Keempat: Semakin meningkatnya ruang gerak fiskal dari Pemerintah Pusat akan mendorong meningkatnya potensi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari dana perimbangan, sehingga kapasitas pembiayaan untuk pembangunan daerah semakin meningkat.

3) Lingkungan Internal (provinsi)

Pertama: Tingginya komitmen pemerintah provinsi terhadap pemberdayaan sektor riil dan UMKM serta penanggulangan kemiskinan dan pengangguran sehingga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang berkualitas.

Kedua: Membaiknya kondisi makro ekonomi Jawa Timur didukung dengan tingkat inflasi Jawa Timur yang tetap terkendali, hal ini ditandai dengan masih terkendalinya stabilitas harga-harga di Jawa Timur.

Ketiga: Intermediasi sektor perbankan untuk bisa lebih mendorong percepatan ekonomi daerah. Hal ini ditandai dengan tingkat penyaluran kredit perbankan di Jawa Timur yang hampir mencapai tingkat maksimal.

Keempat: Seperti halnya perekonomian nasional, perekonomian Jawa Timur juga dicirikan dengan makin menurunnya kontribusi sektor-sektor primer yang disertai makin meningkatnya kontribusi sektor sekunder dan tersier dalam pembentukan PDRB, yang pada akhirnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Kelima: adanya pemilihan kepala daerah akan menyebabkan perkembangan dunia usaha terutama sektor industri, perdagangan, transportasi dan komunikasi.

Mencermati kondisi eksternal dan internal yang cukup kondusif, dibarengi dengan semangat dan kerjasama antara pelaku ekonomi dan pengambil kebijakan yang harmonis dan terbuka, maka diperkirakan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tabel 3.3
Prakiraan Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur Tahun 2010 (%)

No.	Sektor	Skenario Tahun 2010	
		Moderat	Optimis
1	Pertanian	3,33	3,56
2	Pertambangan Dan Penggalian	9,26	9,49
3	Industri Pengolahan	4,03	4,51
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	4,78	5,02
5	Konstruksi	4,00	4,00
6	<i>Perdagangan , Hotel Dan Restoran</i>	7,96	8,46
7	Pengangkutan Dan Komunikasi	10,39	11,03
8	Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan	7,15	7,49
9	Jasa - Jasa	7,01	7,11
Produk Domestik Regional Bruto		6,10	6,50

Sumber: BAPPEDA Provinsi Jawa Timur

3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2011 dan Tahun 2012.

3.2.1. Tantangan Perekonomian 2011 dan 2012

Dengan kemajuan perekonomian yang dicapai pada tahun 2009 dan masalah yang diperkirakan dihadapi pada tahun 2010, maka tantangan pokok yang akan dihadapi pada tahun 2011 dan 2012 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Penanggulangan kemiskinan

Tingginya jumlah penduduk miskin merupakan masalah yang harus diupayakan penanggulangannya. Hal ini memerlukan upaya yang bersifat pemberdayaan masyarakat miskin, ini akan menjadi penting karena akan mendudukan masyarakat miskin bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan. Selain itu diperlukan upaya pemberdayaan agar masyarakat miskin dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi sehingga mengubah pandangan terhadap masyarakat miskin dari beban (*Liabilities*) menjadi potensi (*asset*).

2. Peningkatan penanganan pengangguran

Akibat krisis keuangan global akan berdampak pada perekonomian baik nasional maupun regional, ternyata belum dapat sepenuhnya menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang setiap tahunnya bertambah, terutama penciptaan lapangan kerja di sektor formal. Disamping itu tingkat pendidikan, ketrampilan/ keahlian dan kompetensi tenaga kerja masih rendah. Sementara disisi lain tuntutan dunia kerja akan kebutuhan tenaga kerja trampil, ahli dan kompeten semakin meningkat seiring dengan tuntutan perkembangan ekonomi global.

3. Pertumbuhan

3. *Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas*

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan ekonomi daerah. Hal ini merupakan tantangan cukup berat mengingat, pertumbuhan ekonomi saat ini masih digerakan oleh sektor konsumsi. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang bisa mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi pada sektor riil terutama dengan memanfaatkan mekanisme pasar modal. Selain itu, diperlukan suatu kebijakan pengembangan industri yang berorientasi kepada industri yang berbahan baku lokal serta memiliki keterkaitan kedepan dan kebelakang yang besar.

4. *Stabilitas Sosial dan Politik (penciptaan ketentraman dan ketertiban masyarakat).*

Jawa Timur merupakan daerah yang mempunyai tingkat keamanan yang tinggi. Kondisi ini terbukti dari beberapa kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang telah dilaksanakan berjalan dengan aman dan tertib tanpa gangguan yang cukup berarti, hal ini dikarenakan tingkat pemahaman masyarakat terhadap arti demokrasi semakin baik. Tentunya hal itu akan berdampak pada keberlangsungan pembangunan sosial dan ekonomi.

5. *Penanganan Bencana Alam.*

Kejadian Bencana yang akhir-akhir ini sering terjadi di Jawa TImur menjadikan suatu persoalan yang harus selalu mendapatkan perhatian, hal ini disebabkan bencana yang terjadi tidak saja membawa penderitaan bagi penduduk yang tertimpa bencana, namun juga dapat menyebabkan sarana dan prasarana yang sudah terbangun rusak dan hilang fungsinya. Kondisi ini selanjutnya dapat membawa dampak gangguan kepada transportasi, areal produksi (sawah/industri) serta mobilitas masyarakat dan perdagangan (*business*) yang akhirnya mempengaruhi kinerja perekonomian.

3.2.2. **Prospek Ekonomi Tahun 2011 dan Tahun 2012**

Kondisi perekonomian di Jawa Timur sudah mengindikasikan ke arah keadaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya yang menunjukkan peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur telah mencapai 5,80% dan pada tahun 2007 yaitu mencapai 6,11%. Selanjutnya pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 5,94%, pada tahun 2009 mencapai 5,01% dan diperkirakan pada tahun 2010 masih berkisar 6,50% sedangkan pada tahun 2011 diperkirakan menjadi sekitar 6,63%.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2011 dan 2012, jika ditinjau berdasarkan sektor ekonomi diperkirakan tidak banyak mengalami perubahan yang

mendasar

mendasar bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana pertumbuhannya masih akan ditopang oleh tiga sektor pendukung utama yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan, dan sektor pertanian.

Dari sisi moneter, seperti kestabilan nilai tukar rupiah, terkendalinya laju inflasi dan kestabilan tingkat suku bunga perbankan akan mempengaruhi prospek perekonomian Jawa Timur tahun 2011 dan 2012. Dengan perkiraan relatif stabilnya nilai tukar rupiah dan suku bunga perbankan serta dukungan kebijakan moneter yang hati-hati, serta laju inflasi rata-rata bisa ditekan pada angka sekitar 5%-6% per tahun, maka prospek ekonomi Jawa Timur 2011 dan 2012 akan lebih baik dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2011 diperkirakan sebesar 6,0%-6,6% dan tahun 2012 bisa mencapai 6,0%-7,0%.

Dibidang perbankan, diharapkan bank-bank di Jawa Timur dapat terus meningkatkan dukungannya pada sektor riil dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui subsidi bunga dan penjaminan kredit kepada UMKM serta revitalisasi KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank), sehingga peran bank-bank di Jawa Timur dapat ditingkatkan untuk dapat memberikan kredit-kredit modal usaha kepada UMKM dengan bunga yang terjangkau.

3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam rangka mewujudkan perekonomian daerah yang diinginkan dan untuk mencapai target yang sudah ditetapkan serta dengan melihat tantangan yang dihadapi, maka kebijakan ekonomi daerah ke depan diarahkan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta memperkuat landasan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan upaya penanganan kemiskinan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berbasis pada sumber daya yang ada, untuk itu diperlukan skenario pertumbuhan ekonomi yang optimis, dimana pada tahun 2011 diproyeksikan tumbuh 6,6%, dan pada tahun 2012 diproyeksikan tumbuh 6,5%-7%, dengan rincian pertumbuhan per sektor dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4

Tabel 3.4
Skenario Optimis Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur
Tahun 2011 dan 2012

N0	Sektor	Pertumbuhan (%)	
		2011	2012
1	Pertanian	3,76	3,20
2	Pertambangan dan Penggalian	10,10	11,00
3	Industri Pengolahan	4,21	4,50
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	4,85	5,00
5	Konstruksi	5,00	5,00
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	8,43	8,50
7	Pengangkutan dan Komunikasi	11,98	12,00
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perush	7,45	7,50
9	Jasa - Jasa	7,47	7,50
Produk Domestik Regional Bruto		6,63	6,72

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang diproyeksikan di atas, kebijakan ekonomi daerah diarahkan pada :

- 1) Meningkatkan utilitas kapasitas terpasang, memperkuat struktur industri, memperkuat basis produksi, dan meningkatkan daya saing industri;
- 2) Meningkatnya produksi migas, selaras dengan ditetapkannya Jawa Timur sebagai salah satu kluster industri migas dan kondensat nasional;
- 3) Meningkatkan produktivitas, produksi, mutu dan daya saing, serta nilai tambah produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam rangka menghadapi pasar global khususnya ASEAN - China Free Trade Agreement (AC-FTA);
- 4) Meningkatkan nilai tambah produk melalui pengembangan dan penerapan teknologi pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan serta pengembangan agroindustri di pedesaan;
- 5) Meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dengan peningkatan kualitas sumberdaya lahan (perbaikan bahan organik tanah), peningkatan penyediaan benih unggul dan faktor penunjangnya serta percepatan penganeekaragaman pangan.
- 6) Menjaga stabilitas harga bahan pangan strategis (beras, gula, jagung, minyak goreng) melalui kebijakan harga dan intervensi pasar.
- 7) Meningkatkan efisiensi usahatani melalui rekayasa teknologi berbasis sumberdaya lokal.

8).Meningkatkan

- 8) Meningkatkan pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha, dan mendukung produksi pangan, melalui optimalisasi pemanfaatan hutan alam dan pengembangan hutan tanaman, dan hasil hutan non-kayu secara berkelanjutan;
- 9) Mengembangkan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) melalui akses permodalan kepada perbankan dan non perbankan (Lembaga Keuangan Mikro), meningkatkan peran lembaga penjaminan kredit, memperluas kesempatan berusaha, serta menumbuhkembangkan wirausaha baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja;
- 10) Menciptakan Regulasi yang menjamin kepastian usaha dan penegakkan hukum serta memperbaiki kebijakan investasi sesuai praktek internasional terbaik.
- 11) Meningkatkan akses dan perluasan pasar ekspor, serta perkuatan kinerja eksportir dan calon eksportir, melalui perluasan basis produk ekspor, peningkatan nilai tambah ekspor secara bertahap.

3.4. Analisa dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah

3.4.1. Dana Desentralisasi / APBD

Dana desentralisasi merupakan dana yang pengelolaannya merupakan urusan Pemerintah Daerah dengan berbagai perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Sumber-sumber dana desentralisasi berasal dari PAD, Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan Yang Sah, yang pada tahun 2011 diperkirakan sebesar Rp. 8.912.670.977.631,- terdiri dari :

- 1) Pendapatan Asli Daerah diperkirakan sebesar Rp. 6.809.836.212.631,-
- 2) Dana Perimbangan diperkirakan mencapai Rp. 2.078.034.765.000,-
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diperkirakan mencapai Rp. 24.800.000.000,-

3.4.2. Dana Dekonsentrasi / APBN

Dana dekonsentrasi secara filosofis merupakan dana yang proses perencanaan dan penetapan, keputusan besaran alokasi ditentukan oleh Pemerintah, sedangkan pelaksanaannya dilimpahkan kepada Gubernur melalui SKPD Provinsi dengan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pada tahun 2010 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima alokasi anggaran dana dekonsentrasi sebesar Rp. 3.44 trilyun dan pada tahun 2011 diperkirakan sebesar Rp. 3,78 trilyun dengan asumsi kenaikan belanja dekonsentrasi sekitar 10 % yang didasarkan pada pertumbuhan penerimaan pajak non Migas.

3.4.3. Dana

3.4.3. Dana Tugas Pembantuan / APBN

Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga. Pada tahun 2010 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima alokasi anggaran sebesar Rp. 1.5 trilyun dan pada tahun 2011 akan diusulkan melalui Musrenbang Nasional Tahun 2010 sebesar Rp. 1,7 trilyun.

3.5. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pergantian Pemerintah dari orde baru kepada orde reformasi menuntut pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional. Pemberian kewenangan ini telah diwujudkan dengan pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya dan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai demokrasi dan peran serta masyarakat. Secara konkrit pengaturan ini dilakukan dengan telah diterbitnya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sebagai subsistem yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan negara, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini secara rinci dan teknis telah diterbitkan pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sumber-sumber keuangan daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, penggalan sumber-sumber potensi baru untuk menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dengan ditetapkannya kebijakan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan lebih berorientasi kepada kepentingan daerah yang diimplementasikan dalam bentuk program kegiatan SKPD. Untuk itu, pengalokasian anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah diharapkan dapat memberi kepuasan kepada masyarakat, membuka kesempatan

lapangan

lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, utamanya UMKM serta diberbagai bidang.

Provinsi sebagai daerah otonom, berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga tidak terjadi overlapping untuk membangun kebersamaan dalam meningkatkan kesejahteraan.

Prediksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi di Jawa Timur Tahun 2011 dari Pos Pendapatan Daerah sebesar **Rp. 8.844.688.329.575,-** sedangkan Pos Belanja Daerah yang sebesar **Rp. 9.033.947.695.052,-** Dengan struktur pendapatan dan belanja tersebut, APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 mengalami defisit sebesar Rp. 189.259.365.477,-. Defisit APBD 2011 tersebut ditutup dari selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 189.259.365.477,- yang berasal dari Estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2010 sebesar Rp. 200.000.000.000,- dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 10.740.634.523,-

Sumber pendapatan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar **Rp. 6.743.918.154.290,-** Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat sebesar **Rp. 2.075.970.175.285,-** dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 24.800.000.000,-

Pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp. 5.517.000.000.000,- Retribusi Daerah sebesar **Rp. 56.340.559.100,-** Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan **Rp. 246.000.000.000,-** dan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar **Rp. 924.577.595.190,-**. Sedangkan pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar **Rp. 863.035.410.285,-** Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar **Rp. 1.212.934.765.000,-** dan pendapatan yang bersumber dari Lain-lain pendapatan daerah yang sah (Pendapatan Hibah) sebesar Rp. 24.800.000.000,-

Selanjutnya pada Pos Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Pos Penerimaan dan Pengeluaran meliputi Pos Penerimaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2010 (SiLPA) sebesar Rp. 200.000.000.000,- dan Pos Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 10.740.634.523,-.

3.5.1. Arah

3.5.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2011 diarahkan pada:

- a. Optimalisasi usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dalam rangka *taxing power* di daerah.
- b. Menghapus pajak kendaraan bermotor roda dua yang tahun pembuatannya lama, dan menaikkan pajak kendaraan bermotor roda empat mewah.
- c. Mendorong pemerintah pusat untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan melalui Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil sumber daya alam.
- d. Mengembangkan pendapatan daerah yang bersifat netral, dengan meminimalkan timbulnya dampak distortif atas pengenaan pajak atau retribusi daerah terhadap perekonomian.
- e. Meningkatkan kontribusi BUMD dengan upaya pengelolaan BUMD yang lebih efisien dan efektif.
- f. Penghapusan retribusi yang membebani masyarakat kecil.
- g. Menciptakan hubungan sinergis antara eksekutif dan legislatif dalam penetapan APBD berlandaskan pemahaman bersama, bahwa hubungan DPRD dan gubernur/wakil gubernur tidak semata atas dasar sistem peraturan perundangan yang berlaku, tapi juga konsensus-konsensus etis, dan nilai-nilai budaya lokal yang didasarkan pada keadilan, kebebasan dan kebaikan bersama, meletakkan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok/politik, birokrasi dan pribadi, serta mengedepankan prinsip-prinsip *good governance*.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Dana perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah menetapkan bahwa pelimpahan kewenangan dari pemerintah ke Pemerintah Provinsi, dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota atau sebaliknya dalam pemungutan pajak agar ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Langkah Pemerintah Daerah meninjau kembali perda-perda tentang pajak dan retribusi harus dilakukan agar tidak berakibat pada penerimaan pajak dan retribusi.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan melalui rencana kerja sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan diarahkan pada tujuan untuk semakin mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan yang wujud nyatanya adalah percepatan waktu dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan melalui penambahan tempat pelayanan yaitu pelayanan Drive Through, Pelayanan Samsat Link, Payment Point, Samsat Corner, Samsat Keliling, Samsat Delivery, Samsat Quick Respon (SQR). Selain itu pengembangan Teknologi Informasi dilingkungan KB Samsat antara lain SMS Info Samsat, SMS JT, dan SMS Komplain.

2. Memanfaatkan sumber daya dan mensinergikan Potensi Daerah.

Dengan Program/Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, peningkatan hubungan/kerjasama antar Dinas dilingkungan Provinsi Jawa Timur dan dengan Pemerintah Pusat/BUMN dalam rangka peningkatan penerimaan Bagi Hasil dari Pemerintah, pengembangan fasilitasi kerja sama dengan Kabupaten/Kota dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang potensial, profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi. SDM dalam pengertian ini mencakup kuantitas dan kualitas. Kedua aspek tersebut harus dikembangkan secara berimbang dan paralel. Beberapa kebijakan yang dilakukan adalah melalui diklat, pelatihan etika pelayanan, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Daerah pada Tahun 2011 diproyeksikan mencapai Rp. 8.912.670.977.631,- yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp. 6.809.836.212.631,- dari Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp. 2.078.034.765.000,- dan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan sebesar Rp. 24.800.000.000,-.

3.5.2. Arah

3.5.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah.

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 disusun dengan memperhatikan, mempertimbangkan potensi peluang dan dinamika permasalahan serta perkembangan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu Kebijakan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2011 antara lain diarahkan pada:

- a. Meningkatkan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pangan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas;
- b. Program-program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan serta partisipatif;
- c. Pembangunan infrastruktur pedesaan dalam rangka memperluas lapangan kerja di pedesaan melalui pendekatan program padat karya;
- d. Stimulus pertumbuhan sektor riil melalui bantuan dana bergulir bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam rangka memberdayakan UMKM;
- e. Meningkatkan kepedulian terhadap penerapan prinsip-prinsip efisiensi belanja dalam pelayanan publik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yang meliputi manfaat ekonomi, faktor eksternalitas, kesenjangan potensi ekonomi, dan kapasitas administrasi, kecenderungan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta pemeliharaan stabilitas ekonomi makro;
- f. Meningkatkan efektivitas kebijakan penciptaan kerja sama yang harmonis antara eksekutif, legislatif, serta partisipasi masyarakat dalam pembahasan dan penetapan anggaran belanja daerah;
- g. Pemenuhan belanja sesuai urusan-urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, baik urusan wajib maupun urusan pilihan sesuai dengan peraturan perundangan;
- h. Melanjutkan proyek-proyek strategis yang bersifat tahun jamak (*multi years*) sesuai tahapan;
- i. Belanja penanganan bencana alam dan paska bencana alam dialokasikan dengan pola “Dana siap pakai (on call)” yang sewaktu-waktu dapat dibelanjakan.
- j. Memenuhi prinsip keadilan tidak hanya terkonsentrasi pada lokus tertentu serta dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat;
- k. Mengacu pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa struktur belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Pada RKPD Tahun Anggaran 2011, dialokasikan dana untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.836.801.061.606,- meliputi : Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.608.696.392.649,- Belanja Hibah dialokasikan sebesar Rp. 85.400.000.000,- Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 2.100.000.000,- Belanja Bagi Hasil kepada Kab/Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp. 2.089.835.718.036,- Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 50.000.000.000,- Sedangkan Belanja Langsung dialokasikan dana sebesar Rp. 5.265.129.281.502,-

Adapun belanja Langsung yang terkait dengan eks Pembangunan serta program dan kegiatan dan dialokasikan di seluruh SKPD berdasarkan urusan wajib dan Urusan Pilihan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Pagu Indikatif Per SKPD Tahun 2011

NO.	SKPD	PAGU INDIKATIF
1	2	3
1	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur	907.550.000.000,00
2	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	215.101.225.000,00
3	Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Batu Provinsi Jawa Timur	5.560.011.000,00
4	Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Jember Provinsi Jawa Timur	3.500.000.000,00
5	Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun Provinsi Jawa Timur	2.500.000.000,00
6	Rumah Sakit Khusus Kusta Kediri Provinsi Jawa Timur	3.000.000.000,00
7	Rumah Sakit Khusus Kusta Sumberglagah Mojokerto Provinsi Jawa Timur	3.500.000.000,00
8	Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Surabaya	3.500.000.000,00
9	Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) Surabaya	9.500.000.000,00
10	Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) Pamekasan	6.500.000.000,00
11	Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) Madiun	6.000.000.000,00
12	Rumah Sakit Umum Dr Soetomo Surabaya Provinsi Jawa Timur	37.517.953.000,00
13	Rumah Sakit Umum Dr Syaiful Anwar Malang Provinsi Jawa Timur	13.400.000.000,00
14	Rumah Sakit Umum Dr Soedono Madiun Provinsi Jawa Timur	13.700.000.000,00
15	Rumah Sakit Haji Surabaya Provinsi Jawa Timur	16.000.000.000,00
16	Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya Provinsi Jawa Timur	7.000.000.000,00

NO.	SKPD	PAGU INDIKATIF
1	2	3
17	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur	219.836.976.000,00
18	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur	118.558.820.000,00
19	Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur	155.320.000.000,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi	40.735.000.000,00
21	Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur	175.530.000.000,00
22	Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur	20.200.000.000,00
23	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur	13.900.000.000,00
24	Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur	50.435.641.000,00
25	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur	70.050.000.000,00
26	Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah Provinsi Jawa Timur	87.181.000.000,00
27	Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur	15.444.000.000,00
28	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur	25.550.000.000,00
29	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur	19.250.000.000,00
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur	10.949.000.000,00
31	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur	5.500.000.000,00
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.200.000.000,00
33	Pelaksanaan Harian Badan Narkotika	4.400.000.000,00
34	Biro Administrasi Pemerintahan Umum Provinsi Jawa Timur	8.920.000.000,00
35	Biro Administrasi Kerjasama Provinsi Jawa Timur	12.225.000.000,00
36	Biro Hukum Provinsi Jawa Timur	5.700.000.000,00
37	Biro Administrasi Perekonomian Provinsi Jawa Timur	25.470.000.000,00
38	Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur	13.100.000.000,00
39	Biro Administrasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Timur	6.250.000.000,00
40	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur	13.800.000.000,00
41	Biro Administrasi Kemasyarakatan Provinsi Jawa Timur	29.700.000.000,00
42	Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur	17.321.000.000,00
43	Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur	5.904.000.000,00
44	Biro Keuangan Provinsi Jawa Timur	36.450.000.000,00
45	Biro Umum Provinsi Jawa Timur	1.826.513.000,00
46	Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur	66.900.000.000,00
47	Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur	11.290.000.000,00
48	Inspektorat Provinsi	17.711.700.000,00

49. Dinas Pendapatan

NO.	SKPD	PAGU INDIKATIF
1	2	3
49	Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur	46.362.127.000,00
50	Kantor Perwakilan Jawa Timur	6.760.000.000,00
51	Bakorwil I Madiun Provinsi Jawa Timur	1.175.000.000,00
52	Bakorwil II Bojonegoro Provinsi Jawa Timur	4.000.000.000,00
53	Bakorwil III Malang Provinsi Jawa Timur	2.500.000.000,00
54	Bakorwil IV Pamekasan Provinsi Jawa Timur	2.500.000.000,00
55	Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Timur	9.720.000.000,00
56	Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur	11.120.000.000,00
57	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi	2.900.000.000,00
58	Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	14.500.000.000,00
59	Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur	80.350.000.000,00
60	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur	16.588.000.000,00
61	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	3.178.376.000,00
62	Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur	10.250.000.000,00
63	Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur	56.800.000.000,00
64	Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur	28.200.000.000,00
65	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	46.157.210.000,00
66	Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur	20.048.600.000,00
67	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Jawa Timur	17.400.000.000,00
68	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur	111.521.409.000,00
69	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur	88.409.500.000,00
TOTAL		3.156.878.061.000

Sedangkan matrik rencana kerja RKPD Tahun 2010 diuraikan pada Bab IV.

3.5.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 membawa pro dan kontra terhadap pelaksanaan pembiayaan atas beberapa kewenangan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Mekanisme pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah diutamakan semaksimal mungkin berasal dari potensi penerimaan asli daerah baik melalui pajak daerah, retribusi daerah maupun dari laba BUMD dan penerimaan lain yang dianggap sah serta potensi penerimaan lain yang masih belum terjangkau oleh PAD atau lebih dikenal dengan Kapasitas Fiskal Daerah.

Dalam

Dalam jangka panjang ketika daerah telah mampu mengalokasikan dana pembangunan ke semua urusan yang menjadi kewenangannya, maka ada kemungkinan daerah akan mengalami kekurangan dana untuk melaksanakan pembangunan. Namun kenyataannya tidaklah demikian, karena pembebanan belanja pegawai pusat yang didaerahkan juga menjadi beban DAU sehingga banyak daerah yang justru mengalami kekurangan dana. Walaupun akhirnya pemerintah pusat memberikan tambahan jumlah DAU kepada daerah yang mengalami defisit, namun kemungkinan akan terjadi kondisi daerah kekurangan dana untuk melaksanakan pembangunan tetap saja ada. Langkah yang diperlukan untuk mengatasi hal tersebut adalah peran pembiayaan daerah yang menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit, dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus, dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah yang di diharapkan dari sumber-sumber lain, seperti : masyarakat, swasta serta pemerintah pusat (APBN).

Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut :

- 1) Apabila APBD surplus maka harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Sedangkan pinjaman kepada Pemerintah Pusat /Daerah lain dan / atau pendanaan belanja diutamakan untuk membayar pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian peningkatan jaminan sosial ;
- 2) Apabila APBD Defisit, maka dapat dipenuhi melalui Apabila APBD defisit, maka ditutupi dari penerimaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa); Pencairan dana cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah ;
- 3) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.

Adapun strategi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2011 diarahkan :

a. Dari Sisi Sumber Penerimaan Daerah

Sumber penerimaan daerah Provinsi Jawa Timur dalam lima tahun mendatang dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penggunaan

1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa) sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya;
 2. Menyisihkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa) untuk menambah Dana Cadangan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006;
 3. Penggunaan pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri, melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik dan proyek-proyek besar lainnya.
 4. Memperluas dan meningkatkan kerja sama kemitraan dengan swasta dalam pembiayaan pembangunan melalui berbagai model, antara lain, *Leases and Concession* (LC), *Built, Operations and Transfer* (BOT), atau *Public Private Partnership*;
 5. Pembiayaan pembangunan dengan pola *cost-sharing* antara Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 6. Mengembangkan privatisasi/swastanisasi;
 7. Meningkatkan pemanfaatan pembiayaan dari sumber *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)
 8. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja APBD;
 9. Optimalisasi lembaga keuangan mikro seperti: pengembangan model-model pembiayaan tanggung renteng ;
 10. Pembentukan regulasi yang mendorong termobilisasinya pembiayaan oleh swasta dan masyarakat;
 11. Optimalisasi pemanfaatan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS).
- b. Dari Sisi Sumber Pengeluaran Daerah

Sumber pengeluaran daerah Provinsi Jawa Timur dalam lima tahun mendatang dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut:

1. Melakukan pembayaran hutang pokok yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
2. Penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada BUMD untuk perbaikan kinerjanya;
3. Memberikan *Public Service Obligation* (PSO) kepada BUMD yang tarif layanannya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.